

PENGARUH TRANSFER PUSAT DAN DAERAH KEPADA DESA TERHADAP STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN DI KECAMATAN SANDAI KABUPATEN KETAPANG

YUVINSIUS SELIMAN
yuvinsiusseliman@gmail.com
YARLINA YACOUB
AHMAD YANI

ABSTRACT

Each village, including 13 (thirteen) villages in Sandai District, receives transfer funds either through the Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Budget (APBN) or through the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). There are at least three transfer funds, namely: Dana Desa (DD) from the APBN and Alokasi Dana Desa (ADD), as well as Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) from the Regency APBD. Given the sizeable disbursement of funds provided to manage villages, a benchmark for village success in carrying out development needs to be made by the central government. For this reason, the government issued regulations regarding the Indeks Desa Membangun (IDM) through the Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Number 2 of 2016, as one of the media to find out the development of village progress. The results of this study indicate that: (1) That simultaneously or simultaneously DD, ADD and BHPRD have a significant effect on changes in IDM numbers. And also together these variables are cointegrated with each other and create a movement towards equilibrium in the long run; (2). Partially, the Village Fund has a significant effect on IDM; (3) Partially ADD and BHPRD have no significant effect on IDM in Sandai District..

Keywords: Village Fund, Village Fund Allocation, Tax and Retribution Revenue Sharing Fund, Developing Village Index.

PENDAHULUAN

Setiap desa termasuk 13 (tiga belas) desa yang ada di Kecamatan Sandai menerima dana transfer baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setidaknya terdapat tiga dana transfer yaitu: Dana Desa dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD), serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) dari APBD Kabupaten. Kebijakan perimbangan keuangan dilakukan Pemerintah Pusat, melalui Transfer kepada daerah. Hal ini dilakukan demi mendukung pemerintah daerah untuk melaksanakan beragam kegiatan dan kewenangan otonom yang dimiliki pemerintah daerah, serta mengurangi ketimpangan dan kesenjangan anggaran pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Mengingat cukup besarnya kucuran dana yang diberikan untuk dikelola desa, maka suatu tolak ukur keberhasilan desa dalam melaksanakan pembangunan perlu dibuat oleh

pemerintah pusat. Untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan tentang Indeks Desa Membangun (IDM) melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016. IDM merupakan alat pemerintah dalam campur tangan untuk membantu mengukur perubahan Status Kemandirian Desa melalui pengkajian nilai-nilai komposit seluruh skoring pada beberapa indikator dan pemberdayaan masyarakat perdesaan yang sesuai dengan tipologi, karakteristik, serta modal sosial masyarakat perdesaan tersebut. Penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 terdiri 3 (tiga) Indeks Komposit yang yaitu: Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis: Pengaruh Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) serta Bagi Hasil Pajak dan Retriusi Daerah Terhadap Status Indeks Desa Membangun (IDM) pada di Kecamatan Sandai.

Dengan disalurkan dana transfer Pusat dan Daerah, kepada Desa-desa di Kecamatan Sandai dengan berbagai status IDM-nya tentu saja ada yang mengalami perubahan lebih cepat menuju ke status yang lebih baik, tetapi ada juga desa tergolong lamban atau bahkan tidak berubah status IDM-nya. Berdasarkan data Kemendes PDTT kurun waktu 2018-2022 tercatat dari 13 (tiga belas) Desa yang ada di Kecamatan Sandai, sebanyak 2 (dua) Desa berstatus sebagai Sangat Tertinggal dan 6 (enam) Desa berstatus Tertinggal. Sampai akhir tahun 2022, di Kecamatan Sandai Status Sangat Tertinggal dan Tertinggal menjadi 0% yang ada sebanyak 9 (sembilan) atau 69,2% Status Berkembang dan 4 (empat) atau 30,8% dengan Status Mandiri.

Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Teori Pembangunan

Pada dasarnya pembangunan adalah sesuatu yang bisa merubah struktur sosial ekonomi dalam masyarakat secara keseluruhan dengan tidak mengabaikan bermacam keinginan personal maupun kelompok dan kebutuhan pokok (dasar) untuk bergerak maju

dalam kondisi kehidupan material serta spiritual yang lebih layak. Menurut Rostow sebagaimana dikutip oleh (Digdowiseiso, 2019) dalam buku berjudul “Teori Pembangunan” bahwa Pembangunan dibagi dalam 5 (lima) tahap atau fase, yaitu tahap tradisional, persiapan lepas landas, lepas landas, menuju kedewasaan, dan konsumsi tinggi secara massal. Pada Teori Rostow dijelaskan bahwa, “pada setiap negara, berubahnya suatu kondisi dari terbelakang (underdeveloped) menuju maju (developed) bisa dijelaskan melalui tahapan secara linier. Sebelum suatu negara berkembang menjadi negara maju, harus dilewati suatu tahap yang disebut tahap tinggal landas (take off).” Selanjutnya juga Rostow menyarankan agar negara-negara sedang berkembang (developing country) harus mengikuti seperangkat aturan pembangunan tertentu untuk tinggal landas, sehingga pada gilirannya akan berkembang menjadi negara maju, (Jhingan, 2012). Rostow menjelaskan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan dan ciri-ciri penting dalam suatu masyarakat, yaitu perubahan dalam keadaan sistem politiknya, struktur sosialnya, nilai-nilai masyarakat, dan struktur kegiatan ekonominya

Tujuan pembangunan pada akhirnya untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat. Selanjutnya (Todaro & Stephen, 2011), dalam buku yang berjudul “Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga,” menyebutkan bahwa: “pembangunan dilakukan untuk mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi dan penanganan ketimpangan pendapatan serta untuk pengentasan kemiskinan. Selain itu pembangunan harus dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat dan institusi serta lembaga nasional.”.

Teori Pengeluaran Pemerintah

Rostow dan Musgrave pada (Arsyad, 2004) dalam buku yang berjudul “Pembangunan Ekonomi” disebutkan teori ini mengaitkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahapan pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Saat perkembangan ekonomi baru terjadi, presentase investasi pemerintah terhadap jumlah akhir investasi memang sangat besar, hal ini disebabkan pemerintah harus

menyediakan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat seperti transportasi, kesehatan dan pendidikan, Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar.

Teori Pengeluaran Pemerintah Wagner dalam (Dumairy, 2004), dikemukakan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Wagner mengatakan kecenderungan jika peranan pemerintah dalam pengeluaran meningkat (semakin tinggi pengeluaran pemerintah) maka pertumbuhan dan percepatan pembangunan akan selalu meningkat pula. Selanjutnya Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat, (Mangkoesoebroto, 2014). Kejadian tersebut dikarenakan bahwa pemerintah harus selalu campur tangan dalam menentukan kebijakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, rekreasi, hukum, kebudayaan dan kepentingan lainnya.

Teori Pemberdayaan Masyarakat

Solomon menekankan bahwa: ketidakberdayaan berdampak terhadap ketidakmampuan seseorang untuk menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan pribadi atau golongan. Maka pemberdayaan adalah metode yang sangat baik untuk membasmi dan menghapus nasib yang tidak baik serta ketidak beruntungan yang dialami oleh individu atau kelompok masyarakat. Pengembangan Teori Solomon oleh Lee mengarah kepada semua orang yang mengalami penindasan. Dia mengidentifikasi tiga komponen pemberdayaan yaitu: (1) Untuk mengembangkan pribadi yang lebih positif dan berpotensi (keberhasilan pribadi); (2) Pengembangan pengetahuan dan kapasitas komprehensif kritis dari realitas politik dan sosial lingkungan tertentu (kesadaran kritis) dan; (3) pengembangan sumber daya dan strategi atau kemampuan yang lebih sederhana untuk mengakomodasi tercapainya tujuan personal dan kolektif, (Robbins & Susan, 2006).

Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yakni: konsep daya (power) dan konsep ketimpangan (*disadvantaged*). Lebih Lanjut Ife dalam (Zubaedi, 2013). Ife juga mengidentifikasi 6 (enam) jenis kemampuan atau kekuatan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan. Kekuatan-kekutan itu adalah: (1). Kemampuan menentukan pilihan; (2). Kemampuan menentukan kebutuhan sendiri; (3). Kebebasan berekspresi; (4). Kemampuan kelembagaan; (5) Adanya akses sumber daya ekonomi; serta (6). Kebebasan dalam proses reproduksi.

Teori Actors, merupakan suatu teori yang kerap dipakai dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Menurut Cook dan Macaulay seperti dikutip dari sebuah artikel "Teori Actors dalam Pemberdayaan Masyarakat" (Maani, 2011), pada Jurnal Demokrasi (Vol X, No 1, 2011) bahwa: "masyarakat dinilai sebagai subyek yang mampu melakukan perubahan apabila terlepas dari kendali yang kuat dan mendapatkan kebebasan untuk bertanggung jawab atas ide, keputusan, dan tindakan mereka."

Teori Pengembangan Ekonomi Lokal

Untuk meningkatkan pembangunan daerah, terutama pada daerah perdesaan, maka pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut melalui Pengembangan Ekonomi Lokal atau Local Economic Development (LED). Seperti yang dikutip (Supriyadi R, 2017), Blakely mengemukakan beberapa 4 (empat) indikator yang dapat membuat pengembangan ekonomi lokal menjadi berhasil yaitu: (1). Pengembangan kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat kecil; (2). Adanya perluasan bagi masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatan; (3) Adanya pemberdayaan pengusaha usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran; dan (4). Adanya perluasan jaringan (Net Work) secara kelembagaan serta bermitranya antara masyarakat lokal dengan pemerintah dan swasta. Dalam pengembangan ekonomi lokal (PEL) mencoba merumuskan secara kelembagaan pembangunan di daerah, melalui peningkatan kemampuan SDM dalam

menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal, (Munir, 2007).

Teori Pengembangan Wilayah

Teori ini meliputi: (1) Determinisme lingkungan alam: disebut juga Physical Environment Determinism, teori determinisme lingkungan alam memuat pemahaman bahwa lingkungan alam memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat di suatu wilayah atau negara. Pengaruh kondisi alam tersebut dapat positif maupun negative; (2) Determinisme kebudayaan: disebut juga Cultural Determinism menilai perbedaan kebudayaan masyarakat berpengaruh terhadap tingkat kemajuannya suatu wilayah. Teori ini memandang bahwa kemajuan pembangunan suatu wilayah dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya.

Friedman dan Allonso dalam Sembiring (2012), menyatakan bahwa pengembangan wilayah dalam jangka panjang harus ditekankan pada pengenalan penggalan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi pengembangan lokal wilayah yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat termasuk pengentasan kemiskinan serta upaya mengatasi kendala pelaksanaan pembangunan pada wilayah tersebut. Konsep Agropolitan pada dasarnya ingin memberi pelayanan yang biasanya terdapat di kota tapi dapat terlayani di desa. Konsep ini juga diharapkan dapat memecahkan permasalahan terkait kebutuhan sosial budaya dan kehidupan setiap hari.

Berdasarkan komponen-komponen pengembangan wilayah tersebut dapat dilihat beberapa aspek diantaranya: Aspek Kelembagaan, Aspek Sosial Budaya Masyarakat, Aspek Lingkungan dan Ekonomi. Tentu saja konsep dalam pengembangan teori ini harus dilaksanakan dengan sinergitas dan saling mendukung. Sehingga dapat didefinisikan bahwa agropolitan adalah sebuah pendekatan pembangunan berbasis pertanian dalam pembangunan ekonomi secara terpadu dan berkelanjutan melalui infrastruktur desa yang

berkembang agar dapat melayani, mendorong, serta memacu wilayah sekitarnya agar terjadi pembangunan pertanian.

Kajian Empiris

Arina *et al* (2021), yang meneliti pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara, memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Minahasa Tenggara baik jika diuji secara bersamaan ataupun secara terpisah. Penelitian ini menemukan bahwa secara bersamaan IDM dipengaruhi oleh ADD dan DD secara signifikan pada Kabupaten Minahasa Tenggara, sedangkan secara terpisah, IDM dipengaruhi DD dengan signifikan dan juga dipengaruhi ADD dengan signifikan pula di Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian, (Sandag dkk., 2022) juga dilakukan pada Kabupaten Minahasa Tenggara, yang meneliti pengaruh pendapatan desa terhadap IDM di Kabupaten Minahasa Tenggara. Riset ini bertujuan untuk mengetahui: Pengaruh masing-masing dan secara bersamaan (simultan) dari PADes, DD dan ADD terhadap IDM Minahasa Tenggara. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel, yaitu penggabungan cross section dan time series. Dalam penelitian ini dihasilkan: (1). PADes tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IDM di Kabupaten Minahasa Tenggara; (2.). DD berpengaruh signifikan terhadap IDM di Kabupaten Minahasa Tenggara; (3). ADD berpengaruh signifikan terhadap IDM di Kabupaten Minahasa Tenggara; dan (4) PADes, DD dan ADD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IDM di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Farida *et al* (2020), yang meneliti Pemanfaatan Dana Desa untuk Mewujudkan Desa Mandiri. Tujuan penelitiannya untuk menyediakan pengetahuan serta penyuluhan dalam menggunakan Dana Desa dengan menggunakan bantuan dari perguruan tinggi dan masyarakat dalam memberikan saran kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan teknik

analisis deskriptif. Perolehan data dilakukan dengan melakukan wawancara menggunakan kuesioner serta dengan melakukan Focus Discussion Group (FGD). Penelitian ini dilakukan pada dua desa yaitu di Kecamatan Tanimulya, Desa Ngamprah serta di Kecamatan Padalarang, Desa Laksana Mekar Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk desa serta pemerintah agar Dana Desa terus diberikan kepada Desa.

Astika & Sri Subawa (2021), dalam penenlitiannya mengevaluasi pembangunan desa berdasarkan Indeks Desa Membangun, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana taraf pembangunan pada Desa Penatahan, serta mengetahui determinan yang mendukung ataupun menghambat penyelenggaraan pembangunan dan mengetahui pengaruh dari dilaksanakannya pembangunan desa pada pencapaian tujuan Desa Penatahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan memperoleh data dengan wawancara serta dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa pembangunan desa yang dilakukan pada Desa Penatahan tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Pencapaian pembangunan Desa Penatahan dipengaruhi oleh pembangunan yang dilakukan serta tata kelola pada pemerintah perdesaan. Kemudian adanya ketergantungan pembangunan disebabkan oleh tidak adanya Pendapatan Asli Desa.

Yulitasari & Tyas (2020) meneliti bagaimana Status Desa dan Dana Desa pada Provinsi Jawa Tengah, dan hubungan antara keduanya. Penelitian ini dilakukan dengan data sekunder berupa jumlah Dana Desa dan Indeks Desa Membangun sebagai proksi Status Desa pada tahun 2018 hingga tahun 2019 di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan uji regresi linear sederhana. Penelitian ini menemukan bahwa di Provinsi Jawa Tengah Dana Desa yang diberikan mengalami peningkatan sebesar 14.7% pada tahun 2019 dan meningkat secara agregat terhadap status desa, hasil uji regresi menemukan bahwa perubahan Indeks Desa Membangun (Status Desa) tidak dipengaruhi secara signifikan oleh berubahnya jumlah Dana Desa yang diberikan pada Provinsi Jawa Tengah.

Kemudian pengaruh DD, ADD dan PAD Desa terhadap IDM pernah diteliti oleh juga Iftitah & Wibowo (2022). Penelitian mereka dilakukan di Kabupaten Gowa, yang mempunyai

tujuan menganalisis pengaruh penggunaan DD berupa penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa, PADes, serta ADD terhadap IDM, tahun 2017-2018. Penelitian mereka menghasilkan dimana penggunaan DD dalam penyertaan modal BUMDes dan PADes berpengaruh positif terhadap angka IDM. Tetapi ADD tidak mempunyai pengaruh terhadap IDM secara signifikan. Penelitian ini juga memerikan rekomendasi harus adanya perubahan menuju perbaikan terhadap pengelolaan BUMDes supaya kemandirian desa dapat terdorong. Selanjutnya sebuah riset oleh (Rokan, 2022) yang menganalisis kebijakan dana desa atau pendapatan desa dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap IDM di Kabupaten Langkat Kecamatan Brandan Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap IDM di Kabupaten Langkat, sedangkan DD, ADD, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IDM di Kabupaten Langkat.

Penelitian lain yang dijadikan acuan yang berkaitan pengaruh variabel bebas, dalam hal ini Transfer daerah yaitu penelitian Rimawan & Aryani (2019). Yang menganalisis pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta kemiskinan di Kabupaten Bima. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengaruh diberikannya ADD terhadap kemiskinan, IPM serta pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh ADD secara positif, IPM juga dipengaruhi secara positif oleh ADD, sedangkan kemiskinan tidak dipengaruhi oleh ADD. Oleh dari hasil tersebut pemerintah perlu mengupayakan peningkatan program pemberdayaan masyarakat agar kemiskinan dapat dikurangi.

Ma'ruf & Bawono (2019), yang dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pengaruh oleh DD, ADD, dan BHPRD terhadap Alokasi Belanja Desa untuk kesehatan di Kabupaten Wonosobo yang menerapkan Jumlah Penduduk Miskin sebagai variabel perantara. Penelitian ini menemukan bahwa belanja kesehatan dipengaruhi DD, tetapi belanja kesehatan tidak dipengaruhi oleh ADD dan BHPRD. Variabel perantara dipengaruhi secara negatif oleh jumlah penduduk miskin. Namun, jumlah penduduk miskin

berpengaruh negatif sebagai variabel pemoderasi terhadap hubungan ADD dan pengeluaran kesehatan. Jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh sebagai variabel pemoderasi terhadap hubungan DD dan pengeluaran kesehatan dan juga tidak berpengaruh sebagai variabel pemoderasi terhadap hubungan BHPRD dan pengeluaran kesehatan.

Sebuah penelitian oleh Wahyudi (2020) yang bertujuan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah provinsi khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan untuk infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Bentuk penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode eksplanasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tetapi pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur berpengaruh signifikan. Kemudian, pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, sedangkan pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur tidak berpengaruh signifikan. Dalam penelitian ini direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi untuk lebih mengoptimalkan anggaran belanja urusan wajib (mandatory spending) dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan. Kemudian secara terus menerus agar meningkatkan pengeluaran untuk infrastruktur, dengan memperhatikan efek stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitiannya adalah Kuantitatif Deskriptif yang mengolah data sekunder dengan bantuan Aplikasi Eviews versi 12, dalam proses mencapai kebenaran dengan penggunaan data yang berbentuk angka (numeric) untuk suatu hal yang ingin diketahui. Penelitian ini menggunakan data sekunder, sedangkan menurut waktu pengumpulannya adalah berupa data panel, yaitu: merupakan penggabungan data Times Series (I) serta Cross Section (T) menurut deret waktu dan data silang, dimana satu penyilangan unit terukur pada waktu yang berbeda atau dari waktu ke waktu, (Gujarati, 2006). Pada penelitian ini data diperoleh dan

didapat dari dinas/instansi, berupa data keuangan atau pagu dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017-2021 yang ditetapkan melalui Keputusan maupun Peraturan Bupati Ketapaang. Kemudian data IDM pada 13 (tiga belas) Desa di Kecamatan Sandai tahun 2018-2022, dari Kemendes PDTT.

Analisis Data.

Uji Regresi Linier Berganda

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Transfer Pusat dan Daerah kepada desa sebagai variabel independen terhadap IDM sebagai variabel dependen (data sekunder). Berikut merupakan persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini:

$$IDM = f(DD, ADD, BHPRD)$$
$$IDM = \alpha + \beta_{1.DD} + \beta_{2.ADD} + \beta_{3.BHPRD} + e$$

Dimana:

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi dari DD, ADD dan BHPRD

e = Error/ tingkat kesalahan

Uji Koefisien Determinasi (R-Squared / R²)

R-Squared (R²) adalah pengujian yang menilai seberapa besar kekuatan (besaran proporsional) variasi dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Selain itu juga Koefisien Determinasi digunakan untuk menilai sebaik apa garis regresi apa suatu model yang kita miliki, (Widarjono, 2018).;

Uji t (Uji Parsial) dan Uji F (Uji Simultan)

Uji t atau uji parsial yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara individu terhadap variabel terikat (secara parsial). Sedangkan F (Uji Simultan) dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Cara yang

digunakan adalah dengan melihat besarnya nilai probabilitas signifikan-nya. Menurut (Ghozali, 2018),

Uji Kointegrasi

Uji ini dilakukan agar kita tahu adanya kemungkinan hubungan keseimbangan jangka panjang antara variabel-variabel ekonomi yang digunakan dalam penelitian. Hasil uji disebut ada indikasi hubungan jangka panjang jika data tersebut terkointegrasi pada tingkat yang sama, atau ekuilibrium (Gujarati, 2006). Jika variabel dinyatakan terkointegrasi maka kondisi regresi palsu dapat dihindari meski variabel terikat dan variabel bebas dalam kondisi tidak stasioner. Selanjutnya pengujian kointegrasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji kointegrasi Durbin Watson, atau uji kointegrasi Johansen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil Uji Estimasi Regresi dengan alat analisis pengolahan data melalui Aplikasi Eviews Versi 12, dimana IDM sebagai Variabel Terikat (dependen) serta DD, ADD dan BHPRD sebagai Variabel Bebas (independen) didapat hasil seperti dapat dilihat pada Tabel 1. sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Estimasi Regresi

Dependent Variable: IDM				
Method: Panel Least Squares				
Date: 02/05/23 Time: 10:28				
Sample: 2017 2021				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 13				
Total panel (balanced) observations: 65				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.729035	3.003220	-0.575727	0.5674
LOG(DD)	0.139346	0.058051	2.400390	0.0202
LOG(ADD)	-0.042985	0.176198	-0.243960	0.8083
LOG(BHPRD)	0.020659	0.016572	1.246614	0.2185
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.863466	Mean dependent var	0.643614	
Adjusted R-squared	0.821669	S.D. dependent var	0.122263	
S.E. of regression	0.051631	Akaike info criterion	-2.879653	
Sum squared resid	0.130622	Schwarz criterion	-2.344419	
Log likelihood	109.5887	Hannan-Quinn criter.	-2.668469	
F-statistic	20.65893	Durbin-Watson stat	2.237915	
Prob(F-statistic)	0.000000			

* = Signifikan, lebih besar dari $\alpha = 0,05$ (hasil pembulatan)

Sumber: Hasil Estimasi Model Fixed Effect, (Diolah, 2023)

Berdasarkan hasil estimasi regresi model pada tabel 1. di atas, maka ditemukan model persamaan regresi ialah sebagai berikut.

$$IDM_{it} = -1,7290 + 0,1393DD_{it} - 0,0429 ADD_{it} + 0,0207 BHPRD_{it} + e_t$$

Nilai tetapan estimasi regresi sebesar -1,7290 hal ini dapat diartikan jika seluruh variabel bebas diasumsikan nol, maka nilai Rata-Rata IDM di Kecamatan Sandai adalah sebesar -1,7290; Nilai koefisien variabel Dana Desa sebesar 0,1393, hal ini dapat diartikan jika Dana Desa meningkat sebesar 1% dan variabel bebas lainnya kita asumsikan konstan, maka rata-rata IDM di Kecamatan Sandai diprediksi naik sebesar sebesar 0,1393; Nilai koefisien variabel Alokasi Dana Desa adalah -0,0429, hal ini dapat diartikan jika Alokasi Dana Desa meningkat sebesar 1% dan variabel bebas lainnya kita asumsikan konstan, maka rata-rata IDM di Kecamatan Sandai diprediksi turun sebesar 0,0429; Nilai koefisien variabel BHPRD adalah 0,0207 hal ini dapat diartikan jika BHPRD meningkat sebesar 1% dan variabel bebas lainnya kita asumsikan konstan, maka rata-rata IDM di Kecamatan Sandai diprediksi meningkat sebesar 0,0207.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Adapun hasil perhitungan uji R² terlihat seperti pada Tabel 1., menunjukkan nilai R-squared estimasi adalah sebesar 0,8635. Karena nilai R-squared cenderung meningkat atau semakin besar bila jumlah variabel bebas dan data observasi yang digunakan semakin banyak, maka R-squared yang akan dipakai adalah Adjusted R-squared yang dapat menghapuskan sifat bias sebagai penyebab dari bertambahnya jumlah variabel independen dan akumulasi data observasi. Nilai Adjusted R-square estimasi adalah sebesar 0,8217. Nilai tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, yakni DD, ADD dan BHPRD dapat menjelaskan IDM di Kecamatan Sandai sebesar 82,17%. Adapun selebihnya, yakni 17,83%, adalah variabel bebas lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Uji t (Uji Parsial) dan Uji F (Uji Simultan)

Nilai P value variable Dana Desa adalah 0,0202 yang dinyatakan kecil dari tingkat kepercayaan atau $\alpha = 0,05$, sehingga H₀ ditolak, yang berarti Dana Desa secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap IDM di Kecamatan Sandai ($0,0202 < 0,05$); Nilai P value variabel Alokasi Dana Desa adalah 0,8083 yang dinyatakan lebih besar dari tingkat kepercayaan atau $\alpha = 0,05$, sehingga H₀ diterima, yang berarti Alokasi Dana Desa secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap IDM di Kecamatan Sandai ($0,8083 > 0,05$); Variabel BHPRD (X₃) Nilai P value variabel BHPRD adalah 0,2185 yang dinyatakan lebih besar dari tingkat kepercayaan atau $\alpha = 0,05$, sehingga H₀ diterima, yang berarti BHPRD secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap IDM di Kecamatan Sandai ($0,2185 > 0,05$).

Pada Tabel 1 juga kita dapat melihat hasil Uji F. Uji F atau Uji Simultan digunakan untuk menghitung seberapa besar variabel independen dapat berdampak pada variasi variabel dependen secara bersamaan atau simultan. Dimana P value uji-f sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,00000 < 0,05$), sehingga H₁ diterima. Artinya semua variabel independen yakni DD, ADD dan BHPRD secara simultan atau secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IDM di Kecamatan Sandai.

Uji t (Uji Parsial) dan Uji F (Uji Simultan)

Berdasarkan hasil Uji Kointegrasi dengan bantuan Aplikasi Eviews 12. dengan uji Model Statistik Johansen (Johansen Statistic Model), menghasilkan uji statistik yaitu: Cointegration Rangk Test (Trace) dan Cointegration Rangk Test (Max Eigenvalue) seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2. Hasil 4 (empat) nilai Trace Statistic semuanya lebih besar dari ($>$) Critical Value (Nilai Kritis $\alpha = 0,05$).

Hasil ini menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut yaitu: IDM sebagai variabel terikat, serta DD, ADD dan BHPRD sebagai variabel bebas, terjadi kointegrasi atau terjadinya hubungan keseimbangan (equilibrium) jangka panjang pada variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Atau dengan kata lain selama periode pengamatan variabel-variabel dalam model akan menuju titik yang sama (Berkonvergen) setidaknya sebanyak 3 (tiga) kali.

Tabel 2. Hasil Uji Kointegrasi Dengan Model Johansen

Date: 02/02/23 Time: 08:45 Sample (adjusted): 4 65 Included observations: 62 after adjustments Trend assumption: Linear deterministic trend Series: IDM DD BHPRD ADD Lags interval (in first differences): 1 to 2				
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)				
Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.402954	82.17130	47.85613	0.0000
At most 1 *	0.320135	50.19411	29.79707	0.0001
At most 2 *	0.212080	26.27076	15.49471	0.0008
At most 3 *	0.169198	11.49255	3.841465	0.0007
Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values				
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)				
Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.402954	31.97719	27.58434	0.0127
At most 1 *	0.320135	23.92334	21.13162	0.0197
At most 2 *	0.212080	14.77821	14.26460	0.0414
At most 3 *	0.169198	11.49255	3.841465	0.0007
Max-eigenvalue test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values				
Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b*S11*b=I):				

*Nilai Kritis/Level ($\alpha = 0,05$)

Sumber: Hasil Pengolahan Uji Johansen (Diolah, 2023)

Pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Indeks Desa Membangun (IDM)

Pengaruh DD terhadap angka IDM secara positif dan signifikan menunjukkan bahwa peranan dan campur tangan Pemerintah Pusat semakin besar atau meningkat kepada desa dalam menunjang pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, hal ini sesuai dengan teori pengeluaran pemerintah menurut Wagner dalam (Dumairy, 2004) dimana jika pengeluaran pemerintah meningkat (semakin tinggi) maka pertumbuhan atau percepatan pembangunan akan meningkat pula. Selanjutnya Wagner menyatakan bahwa pemerintah harus selalu campur tangan dalam menentukan kebijakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, rekreasi, hukum, kebudayaan dan kepentingan lainnya (Mangkoesoebroto, 2014). Teori lain yang mendukung adalah Teori Pembangunan menurut Rostow, dimana menurut Rostow dalam (Digdowiseiso, 2019), pembangunan bisa merubah struktur sosial ekonomi dalam masyarakat secara keseluruhan dengan tidak mengabaikan bermacam keinginan personal

maupun kelompok dan kebutuhan pokok (dasar) untuk bergerak maju dalam kondisi kehidupan material serta spiritual yang lebih layak. Dalam hal ini juga kelompok masyarakat dinilai sebagai aktor atau pelaku utama dalam perubahan dimensi yang didasarkan dengan model atau konsep pemberdayaan dan sesuai dengan 3 (tiga) indeks komposit yang coba dibangun sebagai pembentuk IDM.

Campur tangan atau intervensi pemerintah tidak hanya sebatas pemberian bantuan Dana Transfer, tetapi dengan menerbitkan berbagai regulasi diantaranya adalah Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) tentang prioritas penggunaan DD setiap Tahun Anggaran dan Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM.

Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Indeks Desa Membangun (IDM)

Berpengaruhnya ADD terhadap IDM secara negatif (-) namun tidak signifikan meski ADD naik jika variabel DD dan BHPRD konstan, dikarenakan beberapa hal antara lain, sebagian besar ADD digunakan untuk pelaksanaan Pemerintahan Desa termasuk operasional, biaya perjalanan dinas, alat tulis kantor, pengadaan peralatan dan biaya kebersihan kantor, insentif pelaksanaan penunjang kegiatan perkantoran, pemeliharaan gedung kantor. Kemudian untuk biaya Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang dialokasikan tidak boleh melebihi 70%. Selain itu sebesar 30% dialokasikan untuk pembayaran Penghasilan Tetap (siltap), Honor dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selanjutnya untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Operasional BPD. Artinya penggunaan ADD secara umum belum mampu menyentuh ke arah pembangunan yang dapat meningkatkan dimensi 3 (tiga) indeks komposit sebagai penunjang atau pembentuk Indeks Desa Membangun (IDM).

Gambaran pengaruh ADD terhadap perubahan IDM yang tidak signifikan dan negatif sejalan dengan penurunan penerimaan ADD yang terjadi pada tahun 2018 dan 2020 dari tahun sebelumnya. Dan secara umum (rata-rata) ADD yang diterima Desa di Kecamatan

Sandai mengalami turun-naik. Namun demikian IDM di Kecamatan Sandai secara umum (rata-rata) mengalami kenaikan atau merubah ke status yang lebih tinggi. Pengaruh Bagi Hasil **Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) terhadap Indeks Desa Membangun (IDM)**

Pengaruh BHPRD tidak signifikan dikarenakan diantaranya jumlah bagian yang diterima desa masih kecil. Besar dan kecilnya penerimaan Desa dari BHPRD tergantung dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi yang bisa digali dan direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten. Ditambah lagi porsi atau bagian desa hanya 10% dari total penerimaan. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 yang telah dipaparkan sebelumnya pada landasan teori. Kemandirian dan kemampuan finansial desa juga perlu digali dengan memanfaatkan segala potensi lokal dan pembinaan pemberdayaan. Desa sebaiknya mampu memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Hal ini dilakukan agar komposisi keuangan desa tidak hanya mengandalkan Transfer Pusat dan Daerah melalui APBD Kabupaten dan APBN. Melainkan juga melalui penggalan potensi baik oleh pihak pemerintah maupun swasta. Hal ini sesuai dengan konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (*Local Economic Development (LED)*), menurut Blakely dalam (Supriyadi R, 2017). "Proses di mana masyarakat, dan pemerintah lokal atau daerah, serta pihak swasta bekerjasama, menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik serta menciptakan kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat, dengan tujuan untuk membangun kemampuan perekonomian di tingkat lokal atau daerah yang berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat..

SIMPULAN

Simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bahwa kriteria IDM di Kecamatan Sandai secara rata-rata akan dalam kondisi Sangat Tertinggal jika tidak ada dana Transfer pusat maupun daerah berupa Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD); (2) Bahwa DD yang diberikan kepada Desa di Kecamatan Sandai tahun 2017-2021, berpengaruh signifikan terhadap IDM di Kecamatan

Sandai Tahun 2018-2022. Hal ini sejalan dengan penerimaan DD semakin naik dan IDM juga secara rata-rata naik; (3) Bahwa ADD yang diberikan kepada Desa di Kecamatan Sandai tahun 2017-2021, tidak berpengaruh signifikan terhadap IDM di Kecamatan Sandai Tahun 2018-2022. Hal ini sejalan dengan ketika ADD yang diterima secara rata-rata mengalami penurunan namun IDM secara rata-rata naik; (4) Bahwa BHPRD yang diberikan kepada Desa tahun 2017-2021, tidak berpengaruh signifikan terhadap IDM di Kecamatan Sandai; dan (5) Bahwa secara bersamaan atau simultan DD, ADD dan BHPRD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan angka IDM. Dan juga secara bersama-sama variabel-variabel ini terintegrasi satu sama lain serta menciptakan pergerakan menuju keseimbangan (equilibrium) dalam jangka panjang.

Rekomendasi

Berdasarkan beberapa simpulan dan hasil penelitian serta analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut: (1) Pemerintah Pusat harus tetap memberikan dana kepada desa melalui Transfer DD kepada desa-desa di Kecamatan Sandai, karena dengan DD berpengaruh terhadap perubahan IDM secara signifikan, di mana pemerintah tetap melakukan optimalisasi terhadap belanja wajib dalam meningkatkan akses masyarakat dalam Tipologi dan Karakteristik Sosial. Ekonomi serta Lingkungan; (2) Pemerintah Kabupaten melalui APBD terus memberikan dukungan dana dalam bentuk penganggaran ADD kepada desa agar selain untuk menyukseskan proses penyelenggaraan dan menutupi pengeluaran Operasional Pemerintahan Desa dan BPD serta pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa. ADD dapat juga membiayai pelaksanaan pembangunan dan pembinaan pemberdayaan dan pemulihan ekonomi nasional, untuk mewujudkan program prioritas nasional, dalam menopang DD sebagai Pendapatan Desa sehingga dapat mendorong pelaksanaan pembangunan sesuai tipologi dan karakteristik pembentuk Indeks Komposit IDM menuju Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs); (3) Agar Pemerintahan Desa bersama Daerah

Kabupaten berusaha meningkatkan dan mengoptimalkan serta menggali potensi baik dari Sumber Daya Alam maupun ciri khas lokal yang ada di desa, dalam rangka desa meningkatkan penerimaan dari Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Bagi Hasil Pajak serta Retribusi untuk menunjang Operasional Pemerintahan Desa dan BPD yang selama ini pada umumnya bergantung pada Transfer Pusat dan Daerah; (4) Agar Pemerintah Desa secara keseluruhan dalam melaksanakan atau merealisasikan anggaran berupa Transfer Pusat maupun Daerah Kabupaten dalam pembangunan, berdasarkan atau mengacu kepada dimensi tata kelola prioritas penggunaan anggaran dan acuan konsep dari Indeks Komposit pembentuk IDM yaitu IKS, IKE dan IKL, supaya angka IDM bisa terdorong naik; dan (5) Bahwa supaya hasil penelitian dapat digunakan sebagai salah satu rujukan dalam pengembangan serta pendalaman ilmu pengetahuan, Ilmu Ekonomi umumnya, dan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Ketapang Kecamatan Sandai khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arina, dkk. (2021). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22–41.
- Arsyad, L. (2004). *Ekonomi Pembangunan (Keempat)*. Yogyakarta: STIE YKPN. http://library.fis.uny.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=2777
- Astika, A. N., & Sri Subawa, N. (2021). Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.223-232>
- Digdowiseiso, K. (2019). *Teori Pembangunan* (E. Sugiyanto (ed.)). Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Dumairy. (2004). *Perekonomian Indonesia (Kelima)*. Jakarta: Erlangga.
- Farida, dkk. (2020). Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Mewujudkan Desa Mandiri. *Ikraith-Abdimas*, 4(1), 65–73.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. (2006). *Dasar-dasar Ekonometrika, Terjemahan: Julius A. Mulyadi & Yelvi Andri (D. Barnadi & W. Hardani (ed.); Ketiga)*. Jakarta: Erlangga.
- Hardani, dkk. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (H. Abadi (ed.); Pertama, Nomor March)*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Iftitah, A. E., & Wibowo, P. (2022). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 17–36. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2331>
- Jhingan, M. L. (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Penerjemah D. In Guritno. PT. Raja Grafindo (1 ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, M. (2011). *Metode Kuantitatif; Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi (Keempat)*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

- Ma'ruf, A. F., & Bawono, A. D. B. (2019). Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Belanja Kesehatan. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Dd, 271–284. <http://eprint.stieww.ac.id/1109/1/21> Alifa Fauzia Ma%27ruf dan Andy Dwi Bayu Bawono.pdf
- Maani, K. (2011). Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Demokrasi*, X No. 1(Pemberdayaan), 59.
- Mangkoesoebroto, G. (2014). *Ekonomi Publik (Ketiga)*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi (BPFE).
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia serta kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 9(3), 287–295. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/22539>
- Robbins, P. S., & Susan. (2006). *Perilaku Organisasi (Terjemahan: Benjamin Molan) (Sepuluh)*. Jakarta: Erlangga.
- Rokan, M. F. A. A. (2022). Analisis Kebijakan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Langkat Kecamatan Brandan Barat. Medan: Ekonomi Pembangunan UMSU.
- Sandag, dkk. (2022). Analisis Pendapatan Desa terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 23(1), 94–111.
- Sembiring, M. (2012). *Budaya & Kinerja Organisasi: Perspektif Organisasi Pemerintah*. Bandung: Fokus Media.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Supriyadi R, E. (2017). Telaah Kendala Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal Pragmatisme Dalam Praktek Pendekatan PEL. In *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* (Vol. 18, Nomor 2, hal. 103–123).
- Todaro, M. P., & Stephen, C. S. (2011). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga (Kesembilan)*. Jakarta; Erlangga.
- Wahyudi. (2020). Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 103–113.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonomitrika Pengantar dan Aplikasi Disertai Panduan Eviews (Kelima)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yulitasari, Y., & Tyas, W. P. (2020). Dana Desa dan Status Desa di Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 4(2), 74–83. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.2.74-83>
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktek*. Jakarta: Pustaka Kencana Prenada Media Group.